

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun kualitas manusia dan keberlanjutan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan intelektual *murid*, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dalam membentuk watak, kepribadian, moral, sikap sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam konteks Indonesia, fungsi pendidikan tersebut secara normatif telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan potensi *murid* agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Ketentuan UU tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan karakter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional. Pendidikan yang hanya menghasilkan *murid* yang cerdas secara akademik tetapi tidak memiliki tanggung jawab, integritas, kepedulian sosial, kedisiplinan, dan kesadaran kebangsaan belum sepenuhnya mencapai tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan ketentuan pasal tersebut, pendidikan karakter perlu ditempatkan sebagai proses sistematis yang berjalan bersamaan dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan.

Dalam konteks pendidikan nasional, karakter mempunyai kedudukan strategis karena karakter berhubungan dengan kualitas manusia dalam menjalankan peran individual maupun sosial. Karakter tidak hanya berkaitan dengan perilaku baik secara personal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan

seseorang untuk hidup bersama, menghargai orang lain, mematuhi norma, melaksanakan tanggung jawab, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Pendidikan karakter karena itu harus mampu membentuk murid menjadi individu yang memiliki kemampuan mengambil keputusan secara moral, memiliki kepedulian terhadap sesama, dan mampu menerapkan nilai dalam kehidupan nyata.

Thomas Lickona (1991: 51–53) menjelaskan bahwa karakter yang baik mencakup tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action*. Karakter tidak cukup hanya dibangun melalui pengetahuan mengenai apa yang baik, tetapi juga harus melibatkan perasaan atau kecintaan terhadap kebaikan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Seseorang dapat dikatakan memiliki karakter apabila mengetahui kebaikan, menghendaki kebaikan, dan melakukan kebaikan.

Implikasi penting dari ketentuan tersebut bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah yakni harus meningkatkan dan menguatkan karakter bagi para *murid*. Sekolah tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang nilai, tetapi perlu menciptakan pengalaman pendidikan yang memungkinkan murid memahami, merasakan, membiasakan, dan melakukan nilai tersebut. Proses pendidikan karakter membutuhkan lingkungan pendidikan yang kondusif, keteladanan, pembiasaan, hubungan sosial yang positif, aturan yang konsisten, serta keterlibatan seluruh warga sekolah.

Pendidikan karakter bagi Lickona, perlu melibatkan seluruh dimensi dan unsur kehidupan sekolah. Sekolah yang berhasil membangun karakter tidak hanya mengajarkan nilai melalui kurikulum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan nilai tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekolah perlu membangun hubungan yang baik, menciptakan disiplin yang mendidik, melibatkan *murid*, serta membangun komunitas moral (Lickona, 2004: 217–259). Hal tersebut menunjukkan pentingnya menciptakan sekolah sebagai lingkungan pembentukan karakter secara menyeluruh.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu karakter penting yang untuk dikembangkan melalui pendidikan adalah karakter nasionalis. Karakter nasionalis diperlukan agar murid memiliki kesadaran mengenai identitas kebangsaan, menghargai sejarah dan budaya bangsa, menjaga persatuan, menghormati keberagaman, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta memiliki kesediaan memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara.

Nasionalisme merupakan fenomena yang kompleks karena berkaitan dengan identitas, rasa memiliki, sejarah, budaya, politik, dan kesadaran kolektif. Hans Kohn (1965: 9-16) memandang nasionalisme sebagai suatu keadaan pikiran yang menempatkan bangsa sebagai objek kesetiaan utama individu kepada bangsa dan negara. Nasionalisme tumbuh melalui keterikatan terhadap tanah air, tradisi, wilayah, sejarah, dan otoritas politik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Benedict Anderson (1991: 5-7) menjelaskan bangsa sebagai *imagined political community*, yaitu komunitas politik yang dibayangkan sebagai komunitas yang terbatas dan berdaulat. Bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena sebagian besar anggota bangsa tidak pernah mengenal satu sama lain secara langsung, tetapi mereka memiliki gambaran mengenai kebersamaan sebagai bagian dari satu komunitas nasional.

Kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai suatu landasan utama menuju Indonesia yang satu, yang berbhinneka tunggal ika tergambar dari sidang BPUPKI 29 Mei – 1 Juni 1945 dalam meletakkan dasar negara. Mereka yang menyampaikan konsep dasar negara membahasnya di awal konsep dasar negara, baik Muhammad Yamin (29 Mei), kaum Islam (30 Mei), Soepomo (31 Mei), maupun Soekarno (1 Juni) membahas dan mengungkapkan konsep kebangsaan (nasionalisme) sebagai konsep awal Indonesia merdeka berdiri.

Dalam pidato usulan dasar negara Pancasila, khususnya masalah nasionalisme Indonesia tertuang pada buku Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI (Sekretariat Negara, 1995: 64-69), disarikan sebagai berikut:

.... Dasar Atas buat Indonesia adalah dasar KEBANGSAAN, *Nationale staat*, satu Indonesia, yakni "*le désir d'être ensemble*" (kehendak untuk bersatu atau keinginan untuk hidup bersama). Bukan berarti satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang sempit (*Chauvinism Indonesia uber Alles*), tetapi nasionalisme yang berlandaskan kemanusiaan (*my nastionalism is humanity* – mengutip Mahatma Ghandi) . Tanah air kita Indonesia adalah bagian kecil dari dunia. Satu *Nastionale Staat*, karena bangsa Indonesia memiliki bapak atau nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang secara geopolitik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang tinggal di atas tanah air Indonesia. Allah swt. membuat peta dunia, menyusun peta dunia, tanah air adalah satu kesatuan. Itulah, Allah swt. Menaruh sedemikian rupa. Menurut Geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa sadja, Sumatera sadja, atau Borneo Sadja, atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau Maluku sadja, tetapi seluruh kepulauan yang ditundjuk oleh Allah swt. menjadi satu kesatuan antara dua benua, dan dua Samudra, itulah tanah air kita.

Konsep Anderson di atas penting bagi pendidikan karena menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan bukan sesuatu yang muncul secara otomatis, tetapi dibentuk melalui proses sosial dan budaya. Sekolah merupakan salah satu institusi yang memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran tersebut melalui pembelajaran, pengalaman sosial, simbol kebangsaan, tradisi sekolah, kegiatan bersama, serta pembiasaan nilai.

Dalam konteks Indonesia, karakter nasionalis memiliki hubungan erat dengan Pancasila dan kehidupan masyarakat yang berbhinneka, masyarakat plural. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, serta kondisi geografis. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan apabila disertai kesadaran persatuan, tetapi dapat menjadi sumber konflik apabila tidak disertai kemampuan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan nasionalis perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran kebangsaan yang inklusif, demokratis, menghargai kemanusiaan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Namun, sejak era reformasi yang diikuti kebebasan dalam kerangka demokrasi membuat suburnya berbagai pandangan keagamaan yang bersifat *tahkim* dan *takfiri*, pandangan agama yang intoleran dan radikal, bahkan hendak

mengubah dasar negara Pancasila, sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data yang dirilis Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai radikalisme pada tahun 2018 lalu, ada sebanyak 57,03% guru baik pada level SD dan SMP yang memiliki pandangan intoleran di Indonesia. Hal tersebut senada dengan data yang dirilis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Data tersebut menyebutkan 48,9% murid mendukung adanya tindakan radikal (Diakses: Jumat, 24 Februari 2023, <https://dakwah.unisnu.ac.id>).

Berdasarkan penelusuran *Tribunjateng.com* (30 Mei 2022) tentang pemahaman pelajar terhadap Pancasila dan upaya pemerintah daerah agar generasi muda mencintai Pancasila di Jawa Tengah, ternyata ditemukan murid di sejumlah sekolah telah terpapar paham radikalisme. Namun demikian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, menyatakan belum ditemukan sekolah yang secara terang-terangan menolak ideologi Pancasila. Sekalipun demikian, Haerudin mendapati sejumlah temuan yang mengindikasikan murid atau guru terpapar radikalisme. Misalnya, ada pelajar SMP di Karanganyar tidak mau hormat bendera, kemudian ada SMK di Slawi yang mewajibkan siswinya menggunakan cadar (Diakses: Rabu, 01 Maret 2023-<https://jateng.tribunnews.com/2022/05/30>).

Karakter religius dan kebangsaan sejumlah sekolah di Kabupaten Cilacap mengalami degradasi pemahaman ke arah paham radikal. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap Taufiq Hidayatulloh kepada peneliti menyatakan bahwa pada saat [FKUB](#) melakukan kegiatan deradikalisasi tahun 2016 di sekolah-sekolah, pihaknya menemukan dan teridentifikasi menyebarnya pemahaman dan ajaran radikalisme yang hendak mengganti Pancasila di sejumlah SLTA (SMA/SMK/MA) dan SLTP (SMP/MTs) Negeri maupun swasta (14 SMA Negeri, termasuk SMA Negeri unggulan) di Kabupaten Cilacap. Paham tersebut diajarkan oleh guru sekolah yang berafiliasi kepada kelompok radikal. Guru-guru tersebut berafiliasi dengan sebuah organisasi yang memproklamkan diri ingin mendirikan negara

Islam di Indonesia. Isu pokoknya ingin menegakkan pemerintahan berdasarkan Islam, atau “*Khilafah Islamiyah*” (<https://jateng.tribunnews.com>. 01/3/2023).

Data sekolah-sekolah yang diindikasikan terpapar radikalisme tersebut diperoleh FKUB dari laporan murid maupun orang tua murid sebagai tindak lanjut kegiatan deradikalisasi yang diselenggarakan oleh FKUB Kabupaten Cilacap. “Mereka melaporkan (2015-2026) kegiatan penyebaran paham radikal yang dilakukan oleh guru/pemberi materi kegiatan di awal KBM kepada murid dengan mengutip Q.S. Al-Maidah.” (Diakses: Rabu, 01 Maret 2023 - <https://kbr.id/nusantara/04-04-2017>). Taufiq - Ketua FKUB Cilacap menduga tidak menutup kemungkinan jumlah sebenarnya jauh lebih besar lagi, karena hal tersebut baru berdasarkan data laporan yang masuk dan observasi ke sekolah yang dilaporkan.

Indikasi adanya radikalisme dan intoleransi terhadap anak atas masuknya paham ideologi transnasional (*khilafah*) di Indonesia diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dalam Siaran Pers Nomor: B-313/SETMEN/HM.02.04/06/2022 tanggal 21 Juni 2022, Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar memperkuat dugaan bahwa bahaya radikalisme sudah menyusup di satuan pendidikan. KemenPPPA mengecam sikap dan budaya yang disebarkan oleh doktrin radikalisme tersebut, seperti dilarang hormat pada bendera merah putih, tidak diajarkan mengenai Pancasila sebagai ideologi di Indonesia, tidak pernah ada bendera dan menghormati bendera sampai dengan larangan sekolah memasang foto Presiden. Berbagai sikap dan budaya akibat doktrin tersebut merupakan bagian dari menanamkan sikap intoleransi yang dapat memunculkan paham radikalisme di kalangan *murid*.

Nahar menyebutkan, dari hasil kajian cepat deteksi dini sikap intoleransi di kalangan pelajar yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak terbukti ada 0,7 persen dari total 5.321 responden yang mengikuti kajian cepat tersebut, pelajar menjawab sangat setuju jika ideologi Pancasila diubah dan digantikan dengan ideologi lain, serta masih

adanya 2,5 persen dari total 5.321 pelajar yang menjawab tidak setuju dengan makna ideologi Pancasila. Dengan kata lain, banyak ditemukan sikap-sikap intoleran akan mengarah pada radikalisasi di kalangan pelajar (Diakses: 6 Maret 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/>).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan ideal pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut tidak selalu selaras dengan realitas yang ada. Sejak reformasi, yang diikuti kebebasan dalam kerangka demokrasi membuat suburnya berbagai pandangan keagamaan yang bersifat *tahkim* dan *takfiri*, pandangan agama yang intoleran dan radikal, bahkan hendak mengubah dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara nilai-nilai nasionalisme untuk penguatan jiwa nasionalis dan Patriotik . Sekolah sebagai sarana transformasi dan internalisasi karakter bangsa melalui pendidikan, sudah seharusnya mengupayakan agar nilai-nilai nasionalisme dapat ditanamkan untuk penguatan jiwa Patriotik melalui upaya bela negara. Hal tersebut sebagai upaya memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh.

Pendidikan karakter nasionalis dengan demikian tidak dapat dipahami hanya sebagai pembelajaran tentang simbol negara, sejarah perjuangan, atau upacara bendera. Kegiatan tersebut memang penting, tetapi substansi pendidikan nasionalis harus diwujudkan dalam perilaku nyata *murid*. Karakter nasionalis dapat terlihat dari sikap menghargai keberagaman, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, menghormati simbol negara, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dalam konteks yang tepat, menghargai budaya bangsa, menaati aturan, bekerja keras, memiliki tanggung jawab sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai rasa cinta pada tanah air yang diimplementasikan lewat komitmen untuk melindungi, membela, menghargai, serta berpartisipasi demi kemaslahatan negara. Semangat patriotisme murid

tidak melulu harus diekspresikan lewat kontak fisik layaknya masa perang kemerdekaan, melainkan bisa tecermin dari aktivitas harian yang mencirikan sikap tanggung jawab serta dedikasi bagi nusa dan bangsa.

Oleh karena itu, ada kaitan teoretis yang erat antara kepribadian nasionalis dengan semangat patriotik. Sifat nasionalis berperan sebagai fondasi pemahaman, kepekaan, jati diri, serta prinsip kebangsaan, sementara jiwa patriotik menjadi dorongan untuk mengaplikasikan rasa cinta tersebut ke dalam perbuatan konkret. Berdasarkan pandangan Lickona, interaksi ini serupa dengan tahapan perkembangan dari pemahaman moral (*Moral Knowing*), beralih ke perasaan moral (*Moral feeling*), hingga berujung pada tindakan nyata (*Moral Action*) (Lickona, 1991: 51–53).

Kendala yang kerap didapati ialah bagaimana tata kelola sekolah dalam membentuk watak nasionalis tersebut. Program penguatan karakter tidak akan membuahkan hasil maksimal bila dibebankan pada satu tenaga pendidik atau satu bidang studi saja. Aktivitas ini memerlukan sinergi dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, *murid*, pengawas, orang tua, komite sekolah, hingga elemen masyarakat sekitar. Maka dari itu, penanaman nilai nasionalisme wajib diintegrasikan ke dalam sistem tata laksana pendidikan.

Sistem tata laksana pendidikan pada dasarnya ialah langkah sistematis dalam memberdayakan segala aset pendidikan demi meraih target secara berdaya guna dan berhasil guna. George R. Terry merumuskan empat pilar manajemen utama, meliputi *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), serta *Controlling* (pengawasan). Keempat pilar ini menjadi satu kesatuan yang saling bertautan guna merealisasikan visi lembaga (Terry, 1972: 4). Perencanaan (*Planning*) menjadi langkah awal dan paling krusial dalam menetapkan sasaran, regulasi, cetak biru, program kerja, dan alokasi aset yang diperlukan. Terry menjabarkan tahapan ini sebagai aktivitas menyeleksi dan mengorelasikan data empiris serta menyusun proyeksi masa depan demi merancang agenda kerja yang dibutuhkan dalam meraih capaian ideal (Terry, 1972: 192).

Bila dikaitkan dengan penguatan karakter nasionalis, perencanaan bermakna lembaga pendidikan wajib menetapkan jenis karakter yang dituju, tolok ukur capaian, skema program, penanggung jawab, kebutuhan logistik, serta taktik implementasinya. Langkah perencanaan ini pun harus menyelaraskan internalisasi karakter dengan visi, misi, sasaran sekolah, muatan kurikulum, agenda kesiswaan, iklim sekolah, dan aspek lingkungan sosial sekitar.

Pengorganisasian (*Organizing*) mencakup distribusi porsi kerja, wewenang, alokasi aset, serta sinergi antarpihak yang terlibat. Pada program penguatan watak nasionalis, tata kelola ini menjadi krusial sebab keberhasilan program mustahil dicapai jika hanya bersandar pada guru tertentu. Pimpinan sekolah wajib merumuskan spesifikasi tugas yang transparan bagi guru, wali kelas, pengampu ekstrakurikuler, organisasi *murid*, staf tata usaha, komite, dan elemen terkait lainnya.

Tahap pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*) bertumpu pada bagaimana visi tertulis dan bagan organisasi diterjemahkan ke dalam langkah riil di lapangan. Dalam fase ini, aspek manajerial kepala sekolah, pola komunikasi, pemberian motivasi, keteladanan figur, koordinasi tim, serta kapabilitas guru menjadi penentu utama. Cetak biru penguatan karakter yang ideal tidak akan memberi dampak nyata tanpa adanya konsistensi dalam eksekusinya.

Adapun pengawasan (*Controlling*) esensial dilakukan guna menjamin seluruh program berjalan selaras dengan target, tolok ukur, serta parameter yang sudah ditetapkan. Proses evaluasi ini bukan sekadar ditujukan untuk mencari-cari kekeliruan, melainkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas program berjalan sekaligus menjadi fondasi langkah korektif ke depan. monitoring dan evaluasi berkala menjadi instrumen vital dalam siklus perbaikan mutu penguatan karakter di sekolah.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, penguatan karakter nasionalis dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem tata kelola. Aspek masukan (*input*)

terdiri atas *murid*. Sementara itu, komponen proses mencakup regulasi dan hukum yang berlaku, tenaga pendidik, pimpinan sekolah, muatan kurikulum, fasilitas prasarana, alokasi dana, situasi lingkungan, serta kontribusi masyarakat yang diorganisasikan lewat fungsi-fungsi tata laksana demi mewujudkan aktivitas penguatan karakter. Fase proses ini pada gilirannya ditargetkan mampu membuahkan hasil langsung (*output*) berupa murid berkepribadian nasionalis, serta dampak jangka panjang (*outcome*) berupa generasi muda dengan semangat patriotik yang kuat.

Merujuk pada kerangka berpikir di atas, keberhasilan internalisasi nilai nasionalisme tidak sepatutnya diukur sebatas dari kuantitas agenda kegiatan yang diselenggarakan. Parameter keberhasilan mesti bertumpu pada pergeseran perilaku yang tampak pada diri *murid*. Pihak sekolah boleh jadi mengagendakan beragam rutinitas, seperti upacara bendera, perayaan hari besar nasional, kepanduan Pramuka, bakti sosial, pelatihan bela negara, wadah organisasi *murid*, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dan agenda lainnya. Kendati demikian, poin yang lebih krusial untuk dipertanyakan adalah apakah seluruh rangkaian agenda tersebut efektif dalam menumbuhkan wawasan, kepekaan, sikap, kebiasaan, hingga tindakan patriotik yang riil pada *murid*.

Problem yang kerap mengemuka adalah tuntutan konsistensi antara rancangan program dengan capaian akhir dari pembentukan karakter itu sendiri. Lembaga pendidikan bisa saja mempunyai segudang program bertema nasionalisme, namun belum tentu seluruh agenda tersebut sudah menyatu ke dalam sistem tata kelola yang terpadu. Dampaknya, program-program tersebut berisiko berjalan secara parsial, bertumpu pada inisiatif personal tertentu, bersifat momentum belaka, atau bahkan belum dilengkapi dengan indikator penilaian yang akurat.

Disparitas empiris dalam studi ini bertitik tolak dari potensi adanya jarak antara kondisi ideal penanaman nilai nasionalis dengan realitas pengelolaannya di tingkat satuan pendidikan. Secara yuridis, penguatan karakter sesungguhnya telah memperoleh legitimasi kebijakan nasional yang

sangat kokoh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memosisikan pembentukan kepribadian sebagai pilar fungsi pendidikan nasional, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menempatkan penguatan pendidikan karakter sebagai sebuah gerakan kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial (Republik Indonesia, 2003: Pasal 3; Republik Indonesia, 2017: Pasal 1–3).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 turut menggarisbawahi bahwa Penguatan Pendidikan Karakter diimplementasikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sikap religius, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreativitas, kemandirian, demokratis, heroisme kebangsaan, cinta tanah air, apresiasi prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, kepedulian lingkungan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab (Republik Indonesia, 2017: Pasal 3). Koridor regulasi ini membuktikan bahwa pembentukan karakter nasionalis menempati posisi sentral dalam peta jalan kebijakan pendidikan karakter di tanah air.

Meski demikian, tersedianya payung hukum tidak serta-merta menjadi garansi bagi efektivitas implementasi di lapangan. Masih terbuka celah perbedaan antara regulasi, rancangan program sekolah, eksekusi kegiatan, hingga perubahan perilaku konkret pada murid. Celah tersebut rentan muncul apabila penguatan karakter masih dipandang sebelah mata sebagai agenda pelengkap semata, belum menyatu dengan seluruh esensi pembelajaran, belum mengakar menjadi kultur sekolah, atau minim didukung oleh mekanisme evaluasi yang komprehensif.

Disparitas empiris juga rentan terjadi sewaktu aktivitas bertema kebangsaan lebih condong pada aspek seremonial ketimbang proses peresapan nilai secara mendalam. Kegiatan seperti upacara bendera, perayaan hari kemerdekaan, peringatan hari pahlawan, kepramukaan, dan diklat bela negara memang instrumen yang strategis, namun dayaguna kegiatannya sangat bergantung pada kepiawaian sekolah dalam mengemas makna serta memberikan pengalaman batin yang membekas bagi *murid*.

Hasil studi dari Rawantina mengindikasikan bahwa penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sejatinya dapat diakomodasi lewat jalur formal maupun nonformal di sekolah, akan tetapi dalam realisasinya dijumpai berbagai restriksi yang bersumber dari disrupsi teknologi, cara pandang *murid*, hingga dinamika lingkungan domestik keluarga (Rawantina, 2013: 39–54). Kesimpulan ini mengisyaratkan bahwa penguatan jiwa nasionalisme tidak boleh hanya menggantungkan harapan pada aktivitas instruksional formal di kelas.

Selain itu, kesenjangan empiris juga tecermin dari potensi ketidakselarasan antara ranah kognitif murid dengan tindakan nyata yang mereka tunjukkan. Murid mungkin sangat paham bahwa menghormati jasa pahlawan, merawat persatuan, mengikuti upacara secara khidmat, dan mengapresiasi kebudayaan lokal merupakan cerminan nasionalisme, tetapi pemahaman tersebut tidak otomatis menjelma menjadi perilaku keseharian. Fenomena ini relevan dengan tesis Lickona yang menyatakan bahwa kepribadian yang utuh memerlukan integrasi yang kuat antara aspek pengetahuan, aspek emosi, dan aspek tindakan (Lickona, 1991: 51–53).

Celah berikutnya berkaitan dengan harmonisasi antarlingkungan pendidikan. Murid menyerap stimulasi dari berbagai arah, mulai dari sekolah, keluarga, pergaulan sebaya, media sosial, hingga masyarakat luas. Jika nilai-nilai yang ditanamkan pihak sekolah tidak mendapat resonansi positif dari lingkungan luar tersebut, maka proses peresapan karakter akan menemui jalan buntu. Oleh sebab itu, tata kelola pendidikan karakter nasionalis dituntut mampu menciptakan kolaborasi yang harmonis di antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Melalui penelitian ini, berbagai potensi kesenjangan empiris tersebut akan dibedah lewat pendekatan studi kasus di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi. Studi ini tidak diposisikan untuk menghakimi bahwa kedua lembaga tersebut belum berhasil menegakkan pendidikan karakter. Sebaliknya, riset ini didesain untuk memotret potret faktual di lapangan lewat teknik observasi,

wawancara mendalam, dan telaah dokumen agar didapatkan gambaran utuh tentang bagaimana karakter nasionalis dikelola dalam dinamika sekolah. Proses perencanaan program harus menyatu dengan cetak biru sekolah; struktur organisasi pelaksana dikukuhkan; pimpinan sekolah mampu menggerakkan para guru dan staf; nilai-nilai nasionalisme diejawantahkan dalam aktivitas intrakurikuler serta ekstrakurikuler; perkembangan karakter murid terpantau; dan sekolah konsisten melakukan evaluasi demi perbaikan mutu program.

Disparitas empiris dalam riset ini bukan sekadar melihat dikotomi ada atau tidaknya program, melainkan menelisik kesenjangan antara agenda yang direncanakan dengan eksekusi riil di lapangan, antara aktivitas yang berjalan dengan kedalaman nilai yang diresap, serta antara pengetahuan moral yang dimiliki dengan tindakan patriotik yang ditunjukkan oleh *murid*.

Secara teoretis, urgensi penelitian ini mengemuka karena konsep-konsep seperti manajemen, pendidikan karakter, nasionalisme, dan patriotisme pada dasarnya telah memiliki bangunan teorinya masing-masing, namun belum terintegrasi secara utuh dalam satu model linier yang menerangkan pola pembentukan jiwa patriotik lewat tata kelola karakter nasionalis. Teori manajemen dari George R. Terry sukses memetakan jalannya organisasi lewat fungsi *Planning*, *Organizing*, *actuating*, dan *Controlling* (Terry, 1972: 4). Formulasi ini sangat adaptif untuk menerangkan cara sekolah mengorganisasikan program, logistik, personel, dan agenda kegiatan. Kendati demikian, teori manajemen murni tidak mengulas secara spesifik mengenai substansi nilai nasionalisme maupun dinamika psikologis dalam pembentukan kepribadian *murid*.

Di sisi lain, teori dari Lickona menawarkan eksplanasi yang kokoh mengenai fase pembentukan kepribadian lewat tahapan *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action* (Lickona, 1991: 51–53). Teori ini menyajikan fondasi pedagogis yang kuat untuk menelaah bagaimana sebuah nilai bertransformasi menjadi karakter nyata. Namun, konsepsi tersebut tidak menyediakan peta jalan manajerial yang spesifik mengenai cara kepala sekolah beserta jajaran

organisasi sekolah dalam merumuskan, mengorganisasikan, menggerakkan, hingga mengontrol ketercapaian program penguatan karakter nasionalis tersebut.

Teori nasionalisme dari Hans Kohn menguraikan bahwa nasionalisme merupakan suatu kondisi mental yang berkaitan erat dengan loyalitas seseorang terhadap nusa dan bangsa (Kohn, 1965: 9–16). Di sisi lain, Anderson lebih menitikberatkan pada aspek identitas serta kesadaran kolektif masyarakat yang memandang bangsa sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan (*Imagined Community*) (Anderson, 1991: 5–7). Kendati kedua sudut pandang ini menyajikan fondasi kuat untuk memahami konsep nasionalisme, keduanya tidak secara gamblang mengurai formula tata kelola pendidikan yang mampu menumbuhkan watak nasionalis pada diri *murid*.

Oleh karena itu, studi ini berupaya membedah tiga dimensi utama, yaitu aspek manajerial yang menyoroti cara lembaga pendidikan mengelola program karakter; aspek pedagogis-karakter yang menelaah pola peresapan nilai-nilai nasionalisme; serta aspek perilaku yang menganalisis bagaimana hasil peresapan nilai tersebut mampu mengkristal menjadi semangat patriotik.

Kombinasi dari ketiga dimensi ini menjadi salah satu pilar teoretis dalam penelitian ini. kajian ini tidak memosisikan teori manajemen sebatas instrumen untuk menguraikan tata administrasi program semata. Teori manajemen didayagunakan untuk memotret sistem sekolah dalam mengorganisasikan seluruh potensi aset agar internalisasi karakter dapat berjalan secara konsisten. Begitu pula dengan teori pendidikan karakter, tidak diterapkan hanya demi memetakan nilai-nilai luhur, melainkan untuk menguliti fase transformasi dari ranah kognitif menuju ranah penghayatan dan tindakan nyata. Sementara itu, teori nasionalisme dan patriotisme dipakai sebagai parameter untuk menetapkan substansi karakter yang dituju sekaligus indikator perilaku yang mencerminkan ketangguhan jiwa patriotik *murid*.

Berdasarkan telaah terhadap literatur terdahulu, didapati bahwa riset seputar tema nasionalisme dan patriotisme *murid* sejatinya telah jamak dilakukan dalam beragam latar belakang. Sebagian studi menempatkan figur

guru Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan sebagai aktor sentral dalam menyemai nilai-nilai kebangsaan. Sebagian riset lainnya memilih untuk memfokuskan amatan pada aspek agenda sekolah, proses instruksional di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, ataupun iklim kultur sekolah.

Kajian mengenai internalisasi nilai nasionalisme dan patriotisme pada pelajar tingkat SMA mengindikasikan bahwa pembentukan watak tersebut dapat diakomodasi melalui saluran formal maupun nonformal. Kendati demikian, fokus amatan yang ada sejauh ini masih dominan berkuat pada ragam aktivitas, kontribusi guru, serta kendala dalam implementasinya (Rawantina, 2013: 39–54). Riset lain mengenai andil guru dalam memupuk rasa nasionalisme juga menggarisbawahi krusialnya taktik pembelajaran serta pemanfaatan media belajar yang relevan dengan prinsip kebangsaan. Temuan tersebut mempertegas argumen bahwa guru memegang peranan vital dalam mengonstruksi sikap nasionalis *murid*, namun muncul keterbatasan jika arah penelitian melulu bertumpu pada peran guru secara personal.

Sebab pada hakikatnya, penguatan karakter merupakan sebuah proses institusional yang mengikat banyak elemen. Pimpinan sekolah merumuskan regulasi, guru menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam iklim kelas, pembina kegiatan mengarahkan aktivitas *murid*, staf administrasi menyokong ekosistem sekolah, komite sekolah menggalang dukungan masyarakat, dan murid memosisikan diri sebagai subjek yang menyerap nilai-nilai tersebut. ada urgensi nyata untuk menggeser kiblat penelitian, dari yang semula berfokus pada peran aktor individual menuju ke arah tata kelola sistem pendidikan karakter yang terintegrasi.

Kesenjangan riset (*research gap*) lainnya berkaitan dengan keterpaduan fungsi manajemen. Kebanyakan literatur pendidikan karakter baru sebatas memaparkan cara nilai disemaikan atau bagaimana agenda dieksekusi, namun belum menguliti secara runut korelasi antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap *output* kepribadian *murid*. Program penguatan karakter membutuhkan keberlanjutan. Agenda yang minim perencanaan yang matang berisiko kehilangan arah

kompasnya. Agenda yang tidak diorganisasikan secara transparan rentan memicu tumpang tindih peran. Agenda yang tidak digerakkan secara konsisten akan sangat bergantung pada figur personal. Sementara agenda yang luput dari evaluasi akan sulit diukur tingkat keberhasilannya.

Celah penelitian berikutnya tampak pada diskursus hubungan antara karakter nasionalis dan jiwa patriotik, di mana mayoritas riset terdahulu mandek pada level pengukuran sikap nasionalisme semata. Studi ini berkomitmen melangkah lebih jauh untuk menelisik bagaimana watak nasionalis yang dikelola lewat sistem pendidikan mampu mengejawantah menjadi semangat patriotik sebagai bentuk konkret dari rasa cinta tanah air. Jika riset terdahulu banyak mendeskripsikan *apa* yang dilakukan guru atau sekolah dalam menyemai nasionalisme, maka riset ini berfokus mengurai *bagaimana* konstelasi proses tersebut dikendalikan lewat fungsi manajemen pendidikan sehingga nilai nasionalis dapat terinternalisasi dan bermuara pada penguatan jiwa patriotik *murid*.

Merujuk pada rangkaian kajian di atas, posisi kebaruan (*positioning*) penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pendidikan karakter nasionalis wajib dipandang sebagai sebuah sistem yang utuh, sebab pembentukan kepribadian tidak mungkin bersandar pada satu aktivitas tunggal melainkan lahir dari interaksi simultan berbagai komponen pendidikan. Komponen pertama ialah aspek kebijakan. Lembaga pendidikan memerlukan aturan baku yang memberi arah jelas mengenai klaster nilai dan karakter yang ingin dituju. Aturan tersebut selanjutnya ditransformasikan ke dalam visi, misi, sasaran, program kerja, serta tata pamong sekolah. Komponen kedua ialah aspek sumber daya manusia. Kepala sekolah, dewan guru, staf tenaga kependidikan, pembina kegiatan ekstrakurikuler, hingga komite sekolah mengemban porsinya masing-masing, di mana kapabilitas SDM ini akan linier dengan kualitas eksekusi di lapangan.

Komponen ketiga ialah aspek kurikulum dan pembelajaran. Nilai-nilai kebangsaan harus disisipkan ke dalam materi ajar secara kontekstual, sehingga murid tidak sekadar menghafal sejarah bangsa namun juga

terstimulasi untuk berpikir kritis menyikapi dinamika kebangsaan. Komponen keempat ialah kultur sekolah. Nilai nasionalisme mesti diejawantahkan dalam habituasi keseharian, sebab iklim sekolah dapat menjadi laboratorium alamiah tempat murid merasakan langsung implementasi nilai tersebut. Komponen kelima ialah aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang berfungsi menyediakan panggung nyata bagi murid untuk mengaplikasikan nilai dalam pengalaman riil. Komponen keenam ialah mekanisme evaluasi. Sekolah dituntut memiliki sistem kontrol untuk mendeteksi perubahan perilaku murid sekaligus mengukur efektivitas program kerja yang berjalan.

Dengan demikian, manajemen pendidikan karakter nasionalis pada prinsipnya merupakan sebuah seni mengintegrasikan seluruh komponen di atas demi menggapai target organisasi secara optimal.

Dalam konstelasi ini, pimpinan sekolah menempati posisi sentral dalam manajemen pendidikan karakter. Kepala sekolah memegang peran strategis sebagai dirigen yang menentukan arah kebijakan, membangun kultur organisasi, mendistribusikan logistik dan sumber daya, menyajikan teladan konkret, serta menggerakkan seluruh elemen warga sekolah. Kepemimpinan dalam ranah penguatan karakter menuntut adanya visi yang tajam. Kepala sekolah harus andal menerjemahkan cita-cita pendidikan nasional ke dalam target sekolah dan program kerja yang membumi, yang kemudian dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh warga sekolah.

Pentingnya figur kepemimpinan kepala sekolah yang visioner ini sangat berdampak pada kualitas manajemen pendidikan, selaras dengan pandangan Mulyanto, A., Komara, E., dkk. (2023: 3663) yang menyatakan bahwa implementasi kepemimpinan visioner dalam mendesain kurikulum pendidikan kesetaraan menjadi opsi solutif terbaik di tengah derasny arus globalisasi yang menuntut sikap adaptif serta kemampuan antisipatif terhadap dinamika zaman. Pimpinan sekolah dituntut visioner dalam melahirkan regulasi demi menumbuhkan kepribadian *murid*, khususnya berkaitan dengan karakter kebangsaan.

Selain itu, gaya kepemimpinan kepala sekolah berkorelasi kuat

dengan aspek keteladanan. Gerakan pendidikan karakter akan kehilangan marwahnya apabila seorang pemimpin hanya piawai memberikan instruksi tanpa dibarengi tindakan riil yang selaras dengan nilai yang digaungkan. Dalam konteks penanaman karakter nasionalis, teladan tersebut dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, rasa tanggung jawab, toleransi terhadap pluralisme, apresiasi terhadap kebudayaan lokal, kepedulian sosial, serta dedikasi penuh pada kemajuan dunia pendidikan. Oleh sebab itu, riset ini akan menyoroti bagaimana aspek kepemimpinan kepala sekolah berintegrasi dalam pusaran proses manajemen pendidikan karakter nasionalis.

Di sisi lain, posisi guru juga tidak kalah strategis karena mereka berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan murid setiap harinya. Guru bukan sekadar penyampai materi pelajaran di kelas, melainkan instrumen hidup yang menjadi model perilaku bagi murid nya. Murid menyerap pelajaran bukan hanya dari tutur kata guru, melainkan dari bagaimana cara guru bersikap dan bertindak. Dalam perspektif Thomas Lickona, pembentukan karakter yang utuh menuntut adanya keselarasan yang padu antara dimensi pengetahuan moral, perasaan moral, hingga tindakan moral yang nyata.

Agenda kegiatan yang semata-mata berorientasi pada raihan prestasi tanpa disertai fase kontemplasi karakter cenderung belum mampu menstimulasi peresapan nilai secara mendalam. Oleh sebab itu, tata kelola kegiatan wajib menyisipkan target pembentukan kepribadian sebagai bagian integral dari cetak biru program.

Proses penguatan karakter kebangsaan dan semangat patriotik ini juga dapat diakomodasi lewat instrumen internalisasi kultur sekolah. Kultur sekolah berperan sebagai ekosistem kondusif yang mentransformasikan nilai-nilai luhur menjadi pembiasaan riil. Manakala lembaga pendidikan secara konsisten menegakkan prinsip kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kebersihan, semangat gotong royong, toleransi atas pluralisme, serta kepekaan sosial, maka murid akan mengalaminya langsung dalam realitas harian. Lickona memosisikan penataan sekolah sebagai sebuah komunitas karakter (*community of character*) sebagai pilar krusial dalam gerakan pendidikan karakter. Dalam bukunya

Character Matters, Lickona mengupas secara spesifik perihal perancangan sekolah-sekolah berkarakter (*schools of character*) serta pelibatan aktif murid dalam mengonstruksi iklim sekolah yang berintegritas (Lickona, 2004: 217–258). Pola pikir tersebut memperkuat tesis bahwa penanaman karakter nasionalis seyogianya mengakar menjadi budaya, bukan sekadar komoditas program momentum.

Penguatan nilai nasionalisme yang berjiwa patriotik ini juga tidak luput dari kendala kesenjangan empiris. Salah satu problem fundamental dalam diskursus pendidikan karakter ialah adanya jarak pemisah antara ranah wawasan intelektual dengan ranah tindakan nyata. Murid boleh jadi sangat hafal definisi nasionalisme, menguasai kronologi sejarah perjuangan, memahami urgensi persatuan, serta lancar mengidentifikasi lambang-lambang negara. Kendati demikian, modal kognitif tersebut tidak serta-merta mengejawantah dalam perbuatan patriotik. Berdasarkan teori Lickona, kepribadian yang ideal mengandaikan adanya benang merah yang saling bertautan antara *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action*. Wawasan moral wajib dieksplorasi lebih jauh ke dalam wilayah kepekaan emosi moral hingga bermuara pada tindakan moral yang nyata (Lickona, 1991: 51–53).

Konsepsi dasar ini melandasi urgensi studi ini, sebab penguatan jiwa patriotik dirasa tidak cukup bila hanya diukur dari kecakapan murid dalam menjawab soal-soal bertema nasionalisme. Riset ini perlu meneropong bagaimana nilai-nilai tersebut terwujud dalam perilaku keseharian. Tolok ukur semangat patriotik dalam amatan ini dapat diobservasi dan diteliti lewat tindakan nyata seperti sikap tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, ikhtiar merawat persatuan, penghormatan atas jasa para pahlawan, apresiasi terhadap keragaman, kepedulian menjaga ekosistem lingkungan, kepatuhan pada regulasi, partisipasi aktif dalam agenda sekolah, serta sumbangsih positif bagi sesama.

Berdasarkan telaah konseptual dan tinjauan literatur terdahulu, posisi kebaruan mutakhir (*state of the art*) dalam kajian ini berpijak pada pergeseran paradigma pendidikan karakter, dari yang semula memakai pendekatan nilai

parsial beralih menuju pendekatan sistem komprehensif. Fase pertama ditandai oleh kajian bertema nasionalisme yang menitikberatkan pada aspek identitas, kesadaran kolektif, dan keterikatan emosional pada negara. Kohn mendefinisikan nasionalisme sebagai sebuah kondisi mental dan bentuk loyalitas terhadap bangsa, sementara Anderson mengonseptualisasikan bangsa sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan (Kohn, 1965: 9–16; Anderson, 1991: 5–7). Fase kedua diwarnai oleh studi pendidikan karakter yang berfokus pada tahapan peresapan nilai, di mana Lickona memberikan sumbangsih vital lewat konstruksi *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action* (Lickona, 1991: 51–53).

Fase ketiga berkembang pada ranah kajian kultur sekolah yang memandang lembaga pendidikan sebagai sebuah laboratorium komunitas moral. Lickona menegaskan esensialnya merancang *schools of character* lewat sinergi kolektif seluruh warga sekolah (Lickona, 2004: 217–258). Fase keempat mengarah pada ranah tata kelola pendidikan yang menempatkan fungsi-fungsi *Planning*, *Organizing*, *actuating*, dan *Controlling* sebagai instrumen vital dalam merealisasikan target organisasi (Terry, 1972: 4). Selanjutnya, fase kelima merupakan bentuk peleburan komprehensif antara bidang manajemen pendidikan, pendidikan karakter, gagasan nasionalisme, serta semangat patriotisme.

Studi ini berkomitmen menguliti bagaimana nilai-nilai kebangsaan dikelola dalam bingkai program pendidikan, bagaimana nilai tersebut diresap dalam dinamika kehidupan sekolah, dan bagaimana konstelasi proses tersebut pada akhirnya mampu memproduksi ketangguhan jiwa patriotik pada diri *murid*.

Nilai kebaruan (*novelty*) dalam riset ini dapat diposisikan sebagai rujukan guna memformulasikan model konseptual tata kelola pendidikan karakter nasionalis dalam rangka penguatan jiwa patriotik. Orisinalitas pertama terletak pada integrasi antara teori manajemen makro dengan teori pendidikan karakter mikro. Pilar fungsi *Planning*, *Organizing*, *actuating*, dan *Controlling* didayagunakan untuk membedah pola pengelolaan pendidikan karakter

nasionalis (Terry, 1972: 4). Di sisi lain, kerangka berpikir Lickona dipakai untuk mengurai dinamika internalisasi nilai dari fase *Moral Knowing* bertransisi menuju *Moral feeling* hingga mewujudkan sebagai *Moral Action* (Lickona, 1991: 51–53). Kedua, menghubungkan secara linier antara kepribadian nasionalis dengan semangat patriotik. Riset ini tidak mandek pada pendataan kuantitas nilai nasionalisme, melainkan menelisik aktualisasinya dalam tindakan patriotik nyata. Ketiga, menempatkan figur kepala sekolah, guru, pengawas, pengurus komite, serta murid dalam satu kesatuan sistem analisis tunggal. Dengan demikian, gerakan penguatan karakter tidak lagi dipandang sebagai beban individual aktor tertentu, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif institusi sekolah.

Orisinalitas keempat tecermin dari penerapan metode studi kasus komparatif pada dua lokus pendidikan, yakni SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi. Pendekatan dua kasus ini memfasilitasi peneliti untuk mengeksekusi analisis lintas kasus demi mengidentifikasi kesamaan karakteristik, disparitas operasional, faktor akselerasi, hambatan lapangan, taktik resolusi masalah, hingga pola praktik baik (*good practices*). Kelima, mengadopsi dan mengembangkan model kerangka kerja *input–process–output–outcome*. Komponen *input* yang berisi segenap sumber daya pendidikan diproses secara simultan melalui fungsi manajemen serta proses peresapan karakter demi melahirkan *output* berupa profil karakter nasionalis dan *outcome* jangka panjang berupa penguatan jiwa patriotik. Keenam, riset ini melangkah lebih dalam dengan tidak sekadar mempertanyakan keterlaksanaan program, melainkan menguji apakah agenda tersebut berimplikasi nyata pada transformasi perilaku *murid*.

Merujuk pada paparan di atas, esensi kebaruan dalam studi ini bermuara pada konstruksi Model Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid yang mengombinasikan fungsi *Planning*, *Organizing*, *actuating*, dan *Controlling/evaluating* dengan fase peresapan *Moral Knowing*, *Moral feeling*, dan *Moral Action* melalui media kultur sekolah, proses instruksional kelas, serta agenda intrakurikuler dan

ekstrakurikuler demi melahirkan generasi muda yang berkepribadian nasionalis sekaligus berjiwa patriotik sejati.

Posisi penelitian dapat dirumuskan melalui perbandingan berikut.

Tabel 1.1. Posisi Penelitian

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Fokus	Nasionalisme murid	Manajemen pendidikan karakter nasionalis
Aktor	Guru/murid	Kepala sekolah, guru, pengawas, komite, murid
Orientasi	Penanaman nasionalisme	Penguatan jiwa Patriotik
Pendekatan	Pembelajaran/kegiatan	Manajemen sistem sekolah
Fungsi manajemen	Belum menjadi fokus utama	<i>Planning, Organizing, actuating, Controlling/ evaluating</i>
Teori karakter & manajemen	T. Lickona	integrasi Lickona (<i>Character</i>) dan G.R. Terry (manajemen)
Proses karakter	Pengetahuan/sikap/perilaku	<i>Knowing–feeling–action</i>
Lingkungan	Kelas/kegiatan	Keseluruhan budaya sekolah (intra dan ekstra sekolah)
Lokasi	Umumnya satu sekolah	Dua sekolah
Produk	Temuan implementatif	Model konseptual manajemen

Merujuk pada komparasi dalam tabel tersebut, kajian ini menempati posisi yang lebih spesifik lantaran meleburkan dimensi manajerial, pedagogis, pembentukan karakter, nilai nasionalisme, hingga semangat patriotisme secara sekaligus.

Riset yang mengadopsi rancangan Studi Kasus ini diselenggarakan di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi. Penetapan kedua lokus amatan tersebut ditujukan untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif terkait aktualisasi tata kelola pendidikan karakter nasionalis pada jenjang sekolah

menengah atas. Kedua institusi ini merepresentasikan konteks yang krusial guna meneropong cara regulasi penguatan karakter diejawantahkan ke dalam program kerja sekolah. Studi ini akan menguliti cara lembaga merumuskan perencanaan, menyusun struktur organisasi pelaksana, mengeksekusi program, memotivasi seluruh elemen sekolah, menjalankan pengawasan, serta mengukur capaian hasilnya.

Metode studi kasus pun memfasilitasi peneliti untuk menyingkap dinamika kontekstual di lapangan yang kerap luput dari amatan penelitian survei. Dinamika tersebut meliputi cara kepala sekolah mengomunikasikan instruksi kebijakan, taktik guru mengintegrasikan prinsip nasionalisme dalam materi ajar, optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pembentukan kepribadian, cara murid memaknai esensi agenda kebangsaan, hingga strategi lembaga dalam menyiasati keterbatasan alokasi sumber daya.

Di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi, riset ini berkomitmen merekam praktik tata laksana manajemen yang berjalan secara natural. Temuan dari masing-masing lokus selanjutnya dikonfrontasikan lewat prosedur analisis lintas kasus untuk memetakan kesamaan pola maupun disparitas yang muncul. Lewat pendekatan ini, penelitian sama sekali tidak ditujukan untuk mengomparasikan kedua lembaga dalam koridor "sekolah mana yang lebih unggul", melainkan demi memahami sejauh mana karakteristik organisasi berimplikasi pada tata kelola pendidikan karakter nasionalis.

Berdasarkan seluruh paparan di atas, dapat diidentifikasi beberapa poin esensial yang melandasi pelaksanaan gerakan pendidikan karakter nasionalis di lingkungan sekolah. Pertama, institusi pendidikan nasional mengemban amanah yuridis untuk mengonstruksi watak dan kepribadian murid (Republik Indonesia, 2003: Pasal 3). Kedua, karakter nasionalis menempati posisi fundamental dalam klaster karakter kebangsaan dan telah dikukuhkan lewat regulasi Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (Republik Indonesia, 2017: Pasal 3). Ketiga, nilai kepribadian tidak sebatas berhenti pada ranah kognitif, melainkan wajib diresapi dan diaplikasikan melalui siklus pembentukan *Moral Knowing*, *Moral feeling*, serta *Moral Action* (Lickona,

1991: 51–53). Keempat, konsep nasionalisme bertumpu pada aspek jati diri, loyalitas tunggal, serta kesadaran kolektif kebangsaan (Kohn, 1965: 9–16; Anderson, 1991: 5–7). Kelima, akselerasi semangat patriotik menuntut adanya pengejawantahan nilai-nilai kebangsaan ke dalam perbuatan nyata di lapangan. Keenam, guna memastikan rangkaian proses tersebut berjalan secara terstruktur, penguatan karakter wajib dikendalikan lewat pilar fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan (Terry, 1972: 4). Ketujuh, terindikasi adanya celah disparitas antara idealisme regulasi dengan realitas operasional di sekolah, antara kuantitas program dengan kedalaman proses peresapan nilai, serta antara pemahaman materi nasionalisme dengan pembiasaan tindakan patriotik *murid*. Kedelapan, mayoritas literatur terdahulu masih dominan berfokus pada andil personal guru, metode instruksional, jenis kegiatan, atau sekadar penanaman nilai, sehingga integrasi manajemen sistem karakter nasionalis dalam memicu penguatan jiwa patriotik masih memerlukan kajian mendalam. Serta kesembilan, dibutuhkan pendekatan studi kasus yang andal demi memotret fenomena tersebut secara utuh di tingkat satuan pendidikan.

Berlandaskan pada rangkaian argumen tersebut, riset bertema Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik MURID ini memegang urgensi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Internalisasi watak nasionalis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita luhur pendidikan nasional. Penguatan karakter mustahil optimal jika hanya bersandar pada transfer wawasan teoretis atau aktivitas yang bersifat seremonial-momentum belaka, melainkan menuntut proses peresapan mendalam yang menyatukan ranah intelektual, kepekaan emosi, pembiasaan perilaku, hingga tindakan konkret.

Prinsip nasionalisme menjadi pilar krusial dalam eksistensi bangsa Indonesia sebagai fondasi identitas dan perekat persatuan. Meski demikian, prinsip tersebut wajib dimanifestasikan secara riil dalam dinamika kehidupan *murid*. Salah satu bentuk perwujudan konkretnya ialah kepemilikan jiwa patriotik, yakni rasa cinta tanah air yang diekspresikan lewat perilaku penuh

tanggung jawab, kedisiplinan tinggi, empati sosial, ikhtiar merawat persatuan, penghargaan atas heroisme para pahlawan, penghormatan pada pluralisme, kelestarian lingkungan, kepatuhan hukum, partisipasi aktif dalam iklim sekolah, serta kesediaan memberi sumbangsih positif bagi sesama.

Supaya penanaman watak nasionalis mampu melahirkan generasi berjiwa patriotik, diperlukan rancangan manajemen pendidikan yang terstruktur. Fase perencanaan harus memberikan arah kompas yang presisi; fase pengorganisasian wajib menetapkan spesifikasi tugas yang transparan; fase pelaksanaan dituntut mampu menggerakkan seluruh elemen sekolah secara konsisten; sementara fase pengawasan dan evaluasi berperan menjamin ketercapaian target organisasi yang telah ditetapkan.

Disparitas empiris dalam riset ini bertumpu pada potensi adanya jarak pemisah antara koridor regulasi dengan praktik implementasi, antara cetak biru program dengan eksekusi di lapangan, antara kuantitas agenda dengan kedalaman peresapan nilai, serta antara wawasan nasionalisme dengan tindakan patriotik yang nyata. Kesenjangan teoretis bersumber dari belum terintegrasinya secara komprehensif bangunan teori manajemen, teori pendidikan karakter, teori nasionalisme, serta teori patriotisme dalam menguraikan fase rekonstruksi semangat patriotik lewat manajemen karakter di level satuan pendidikan. Sementara itu, kesenjangan penelitian didasari oleh masih minimnya literatur yang menempatkan tata kelola karakter nasionalis sebagai episentrum amatan utama dan mengorelasikannya langsung dengan penguatan jiwa patriotik via pendekatan studi kasus komparatif dua sekolah.

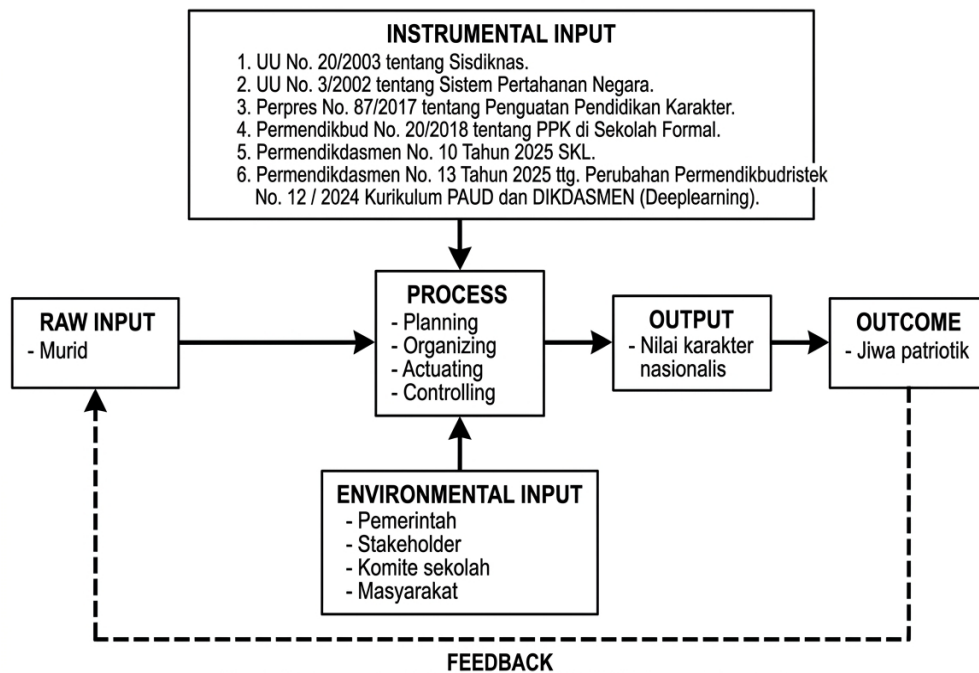
Adapun posisi kebaruan mutakhir (*state of the art*) studi ini berpijak pada peleburan kajian manajemen pendidikan, pendidikan karakter, gagasan nasionalisme, serta prinsip patriotisme ke dalam satu kerangka riset terpadu. Sedangkan unsur orisinalitas (*novelty*) penelitian diarahkan pada formulasi model konseptual Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid yang mengombinasikan pilar fungsi manajemen dengan tahapan internalisasi karakter serta ekosistem budaya sekolah.

Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi positif bagi elemen masyarakat, khususnya bagi para murid sebagai representasi generasi muda yang aktif, religius, rajin, unggul, disiplin dan berintegritas, akuntabel/amanah, serta berjiwa Patriotik (Garuda Batik) yang memiliki kepekaan sosial, sekaligus senantiasa bangga dan mencintai tanah air di tengah realitas keberagaman. Oleh karena itu, berdasarkan pada keseluruhan pemaparan tersebut, penelitian dengan tajuk “Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid (Studi Kasus di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi)” diselenggarakan guna memperoleh pemahaman mendalam perihal bagaimana tata kelola karakter nasionalis diorganisasikan pada tingkat sekolah, bagaimana fase peresapan nilai berlangsung di dalamnya, apa saja faktor akselerasi dan restriksi lapangan yang ditemui, bagaimana taktik sekolah menyasati hambatan tersebut, serta bagaimana konstelasi manajemen sistem tersebut mampu bermuara pada penguatan jiwa patriotik murid.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Akar masalah dalam penelitian ini adalah manajemen pendidikan karakter nasionalis yang berjiwa patriotik murid SMA adalah permasalahan yang terus berkembang baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun penilaian yang belum optimal, terkait hal itu peneliti merumuskan masalah tersebut dalam bagan di bawah ini:



Bagan 1.2. Perumusan Masalah

- a. *Raw Input* adalah murid.

Komponen *raw input* adalah sekolah, guru, dan murid yang akan mengikuti proses pendidikan karakter nasionalis sekolah yang mempunyai potensi kecerdasan, minat belajar, keterampilan, bakat, kepribadian. Sekolah, guru, dan murid ini akan mengikuti proses belajar mengajar (*teaching learning proces*), melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian dengan harapan komponen-komponen tersebut bisa berubah baik dari segi *Afektif*, *Kognitif* dan *Psikomotorik* sehingga menjadi keluaran (*output*) sekolah berkarakter nasionalis dengan *out come* lulusan yang berkarakter nasionalis dan berjiwa patriotik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

- b. *Instrumental Input*

Instrumental input, yaitu memuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang merupakan komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan (*Insrumental input*) adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi proses pembelajaran.

c. *Environmental Input*

Yang termasuk dalam *environmental input* adalah hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi proses pendidikan seperti Dinas Pendidikan, sekolah, keluarga, *Stakeholder*, masyarakat.

d. Proses.

Proses merupakan serangkaian interaksi dinamis dari *raw input* sekolah, guru, dan murid, sebagai masukan dengan sejumlah komponen instrumental *input*, dan *environmental input*. Proses interaksi harus berjalan secara berkesinambungan atau dinamis karena antara komponen ini saling memengaruhi dan berinteraksi. Apabila ada salah satu komponen yang tidak baik dalam proses pembelajaran, akan berpengaruh terhadap *output* yang dihasilkan.

e. *Output*

Output adalah hasil proses manajemen pendidikan dan pembelajaran yang di capai sekolah, khususnya murid yang berkarakter nasionalis, dan berjiwa patriotik, yaitu generasi yang gerak aktif, religius dan rajin, unggul, disiplin, akuntabel dan amanah, serta berjiwa patriotik yang menghargai bhineka tunggal ika, peduli lingkungan, dan berorientasi pada masa depan.

f. *Out Come*

Berdasarkan proses tersebut, akan muncul dampak manfaat yang diharapkan berkontribusi pada perubahan menjadi sekolah yang menghasilkan generasi yang gerak, aktif, religius dan rajin, unggul, disiplin, akuntabel dan amanah, serta menghargai binneka tunggal ika (pluralitas) yang berjiwa patriotik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. *Feed Back*

Respon atau tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan (penerima komunikasi) kepada komunikator (pengirim pesan, berita, ilmu) dapat berlangsung dua arah secara lebih baik. Dampak yang dihasilkan dari manajemen pendidikan nasionalis, jika diketahui ada kendala dalam

prosesnya akan mudah dievaluasi dari awal *Raw Input*.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Cilacap)?

Masalah utama penelitian ini adalah belum optimalnya manajemen pendidikan karakter nasionalis dalam mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme ke dalam proses pendidikan secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan jiwa patriotik murid. Di dalam disertasi juga ditegaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang belum optimal.

Berdasarkan masalah utama tersebut, rumusan masalah penelitian dapat dijabarkan menjadi:

1. Bagaimana perencanaan Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
2. Bagaimana pengorganisasian Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
3. Bagaimana pelaksanaan (*actuating*) Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
4. Bagaimana pengawasan dan evaluasi (*Controlling*) Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
5. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik murid, serta bagaimana solusi yang dilakukan di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
6. Bagaimana penguatan jiwa patriotik murid melalui manajemen

pendidikan karakter nasionalis di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?

2. Pembatasan Masalah

Guna mengarahkan penelitian agar tetap berada pada koridor pokok sasaran yang tepat, maka batasan masalah dalam studi ini difokuskan pada Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik MURID (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Cilacap). Batasan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa ruang lingkup berikut:

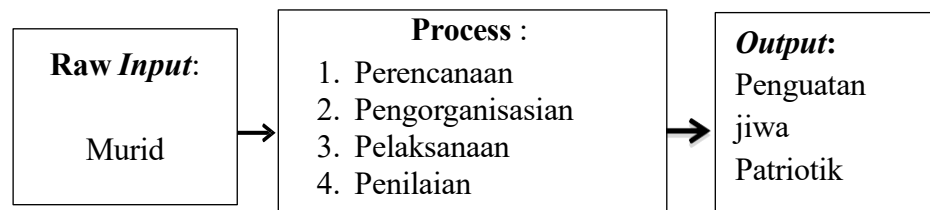
- a. Perencanaan (*Planning*), yaitu analisis mengenai tahap perencanaan dalam manajemen pendidikan karakter nasionalis guna menumbuhkan semangat patriotik murid SMA. Ruang lingkup data yang ditelaah pada fase perencanaan ini meliputi Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Adapun sumber data diperoleh dari Kepala Sekolah, dewan guru yang telah mendapatkan pelatihan karakter nasionalis, murid, serta pihak Komite Sekolah.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu analisis mengenai fase pengorganisasian dalam manajemen pendidikan karakter nasionalis untuk menumbuhkan jiwa patriotik murid SMA. Cakupan data yang diteliti dalam tahap ini meliputi dokumen perencanaan pembelajaran (silabus dan RPP/Modul Ajar), serta skema tindak lanjut dari proses pelaksanaan dan sistem evaluasi pembelajaran. Instrumen sumber data bersumber dari Kepala Sekolah, dewan guru yang dilatih mengenai nilai nasionalisme, *murid*, serta elemen Komite Sekolah.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*), yakni analisis terkait fase penggerakan dan eksekusi dalam manajemen pendidikan karakter nasionalis demi menguatkan jiwa patriotik. Fokus data yang dibedah terdiri atas keselarasan antara perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan di lapangan, teknik penilaian, hingga program tindak lanjut dari aktivitas instruksional tersebut. Pihak yang menjadi sumber data meliputi Kepala

Sekolah, dewan guru yang dibekali pelatihan nasionalisme, *murid*, serta pengurus Komite Sekolah.

- d. Pengawasan (*Controlling*), yakni analisis mengenai fungsi monitoring dan kontrol dalam manajemen pendidikan karakter nasionalis untuk menguatkan jiwa patriotik murid SMA. Lingkup data amatan mencakup pengawasan terhadap aspek perencanaan, realisasi pelaksanaan, instrumen penilaian, hingga tindak lanjut dari seluruh rangkaian proses pembelajaran. Sumber data pada tahap pengawasan ini melibatkan Pengawas Pembina SMA, Kepala Sekolah, dewan guru pengampu nilai nasionalisme, murid, serta elemen Komite Sekolah.
- e. Penilaian (*Evaluating*), dalam analisis manajemen pendidikan nasionalis terkait strategi penguatan murid SMA yang berjiwa patriotik. Data yang diteliti mengevaluasi keterpaduan dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang ditinjau dari empat indikator utama, yaitu: Aspek Pengetahuan (*Moral Knowing*), Aspek Sikap/Perasaan (*Moral feeling*), Aspek Keterampilan/Tindakan (*Moral Action*), serta Aspek Nilai. Informan sumber data bertumpu pada Kepala Sekolah, dewan guru yang dilatih mengenai wawasan nasionalis, murid, serta pihak Komite Sekolah.
- f. Kendala/Hambatan, yaitu analisis mengenai permasalahan yang muncul dalam tata kelola manajemen pendidikan karakter nasionalis yang berjiwa patriotik pada murid SMA. Komponen data yang diteliti diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, meliputi: Hambatan Faktor Internal (dalam lingkungan sekolah) dan Hambatan Faktor Eksternal (luar sekolah). Kebutuhan sumber data digali dari Kepala Sekolah, dewan guru yang dilatih wawasan nasionalis, murid, Komite Sekolah, serta Pengawas Sekolah.
- g. Solusi/Upaya Penyelesaian, yaitu analisis terkait langkah taktis pemecahan masalah dalam sistem manajemen pendidikan karakter nasionalis demi menguatkan jiwa patriotik murid SMA. Fokus data yang ditelaah mencakup formulasi pemecahan masalah untuk Faktor

Internal maupun solusi atas hambatan Faktor Eksternal. Sumber data penunjang digali dari Kepala Sekolah, dewan guru pengampu karakter kebangsaan, murid, serta jajaran Komite Sekolah.

Pembatasan masalah tersebut digambarkan secara skematis pada bagan di bawah ini:



Bagan 1.3. Pembatasan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

a. Tujuan Umum.

Secara umum penelitian ini ingin memperoleh gambaran tentang Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.

b. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah;

- 1) Untuk mengetahui perencanaan pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.
- 2) Untuk mengetahui pengorganisasian pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.
- 3) Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.

SMAN 1 Jeruklegi.

- 4) Untuk mengetahui penilaian pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.
- 5) Untuk mengetahui masalah pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.
- 6) Untuk mengetahui solusi pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kegunaan terkait dengan Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan berkaitan dengan manajemen pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik.

b. Manfaat Praktis

Adapaun manfaat praktis penelitian ini adalah :

1. Bagi pembuat kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dan menjadi bahan kajian serta masukan bagi pembuat kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah dalam pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik.

2. Bagi guru.

Menambah ilmu tentang pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik.

3. Bagi murid

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi murid untuk meningkatkan kompetensinya dalam pendidikan karakter

nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik.

4. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan mengenai Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis Dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian.

D. Pertanyaan Penelitian

Pendidikan karakter nasionalis dalam penguatan jiwa patriotik murid SMA merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM di kalangan generasi muda sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
2. Bagaimana pengorganisasian Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
3. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
4. Bagaimana evaluasi dan penilaian Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
5. Apa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid pada SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?
6. Bagaimana solusi dalam mengatasi atau menghadapi Manajemen Pendidikan Karakter Nasionalis dalam Penguatan Jiwa Patriotik Murid di SMAN 1 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi?